

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Vaksinasi disebut juga imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan sistem tubuh terhadap penyakit. Pemberian vaksin sangat penting bagi anak agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Di Indonesia pemerintah sudah menjalankan program imunisasi rutin untuk generasi muda agar generasi muda Indonesia sehat dan terlindungi dari virus atau bakteri penyebab berbagai macam penyakit. Vaksin memiliki berbagai macam jenis dan manfaat yang berbeda-beda untuk menjaga kekebalan tubuh terhadap virus ataupun bakteri penyebab penyakit.

Imunisasi lengkap dan teratur akan menimbulkan kekebalan spesifik yang mampu mencegah penularan wabah, sakit berat, cacat atau kematian akibat penyakit. Hingga saat ini, 194 negara telah menyatakan imunisasi terbukti aman dan bermanfaat untuk mencegah sakit berat, wabah, cacat dan kematian akibat penyakit berbahaya. (Tempo.co, diakses pada tanggal 1 September 2016)

Dalam penelitian ini penulis memilih kasus vaksin palsu dikarenakan vaksin palsu merupakan tindak kejahatan luar biasa yang mengancam dan membahayakan jiwa orang banyak.

Dipertengahan tahun 2016, vaksin yang bermanfaat penting bagi kesehatan masyarakat Indonesia dipalsukan oleh sejumlah oknum yang mencari keuntungan dari menjual dan mengedarkan vaksin palsu. Vaksin palsu yang diungkap Badan Reserse Kriminal Mabes Polri berawal dari laporan masyarakat dan pemberitaan media massa tentang bayi yang meninggal dunia setelah diimunisasi. (Tempo.co, diakses pada tanggal 1 September 2016)

Praktik pembuatan vaksin palsu itu telah berlangsung selama 13 tahun. Orang tua yang pernah mengimunisasi anaknya dalam rentang 13 tahun belakangan ini tentu risau, jangan-jangan anaknya termasuk yang mendapatkan vaksin palsu. (Tempo.co, diakses pada tanggal 1 September 2016)

Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak berwenang lainnya adalah menarik semua vaksin yang beredar dan menggantinya dengan vaksin yang asli dan aman guna menjamin keamanan dan perlindungan kesehatan bayi-balita Indonesia. Pemerintah juga mengumumkan nama-nama distributor, rumah sakit, klinik dan institusi kesehatan yang terindikasi dan terbukti menggunakan vaksin palsu, serta vaksinasi ulang terhadap anak-anak yang lahir antara 2003 hingga 2016 untuk menjamin generasi yang sehat dan bebas penyakit berbahaya.

Pengungkapan pembuatan vaksin palsu itu pada akhirnya menyeret Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dimintai pertanggungjawaban. Dua lembaga itu dinilai tidak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Praktik pemalsuan sampai 13 tahun dan sudah beredar di Indonesia. Kemenkes dan Badan POM bisa dikatakan tidak menjalankan fungsinya, sesuai kapasitas yang dimilikinya. (Tempo.co, diakses pada tanggal 1 September 2016)

Fakta bahwa pelaku pemalsu vaksin menggunakan kemasan vaksin asli bekas juga menunjukkan pengelolaan limbah medis di rumah sakit masih sangat buruk. Lagi-lagi Kementerian Kesehatan disorot karena lemah dalam pengawasan. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis di rumah sakit merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kasus vaksin palsu. Karena itu, kasus vaksin palsu juga harus menjadi pemicu Kementerian Kesehatan untuk memperketat pengawasan pengelolaan limbah medis di rumah sakit.

Selain meminimalkan bahaya yang mungkin muncul dari limbah media, pengawasan ketat juga untuk menghilangkan potensi pemanfaatan untuk tujuan lain. Pengusutan kasus vaksin palsu juga harus menyentuh kemungkinan pihak lain yang menyediakan limbah medis berupa kemasan vaksin asli bekas kepada para pelaku. Pihak lain itu bisa saja petugas kebersihan, petugas administrasi, perawat bahkan dokter. Bila ada keterlibatan pihak lain tersebut, semua harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberitaan atau informasi dari media massa mengenai kasus vaksin palsu menjadi stimulus bagi masyarakat Indonesia dalam memberikan persepsinya, media massa memberitakan secara aktual setiap perkembangan yang terjadi mengenai kasus vaksin palsu. Media massa juga menyoroti bagaimana sikap dari

presiden Republik Indonesia dalam menyelesaikan dan menuntaskan kasus vaksin palsu tersebut.

Presiden Joko Widodo selama ini dapat dikatakan berhasil dalam membangun citra kepemimpinan yang baik, hal itu dapat dilihat dari rekam jejak karir Joko Widodo di dunia politik yang berawal dari jabatannya sebagai seorang Walikota lalu menjadi Gubernur dan akhirnya pada tahun 2014 Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dengan terungkapnya tidak kejahatan luar biasa ini, Presiden Republik Indonesia harus bertanggung jawab atas apa yang meresahkan masyarakat Indonesia dan mengancam jiwa orang banyak. Presiden harus mengambil langkah tepat dalam menangani kasus ini hingga tuntas, dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga terkait.

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa, mahasiswa merupakan bagian dari publik berperhatian yang sudah seharusnya memperhatikan dan memberikan pandangan atau sebuah tanggapan mengenai fenomena sosial yang terjadi seperti kasus vaksin palsu yang meresahkan masyarakat Indonesia. Mahasiswa ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia angkatan 2013 yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

Mahasiswa angkatan 2013 atau mahasiswa semester tujuh dipilih sebagai populasi pada penelitian ini dikarenakan mahasiswa tersebut sudah banyak menerima berbagai macam pengetahuan ilmiah selama menjalani kegiatan belajar

mengajar di kampus. Maka mahasiswa tersebut dianggap mampu memberikan persepsinya secara ilmiah dan objektif.

Pada penelitian serupa karya Nadya Intan Permatasari, yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Citra Kepemimpinan Joko Widodo pada Kasus KPK dan Polri”. Didapatkan hasil bahwa mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi baik di dalam kampus maupun organisasi yang berada diluar kampus akan memberikan persepsi positif terhadap citra kepemimpinan Joko Widodo, hal ini disebabkan karena mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi mengikuti fenomena sosial tersebut secara mendalam. Sebaliknya untuk mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi atau lebih sering disebut dengan “Kuliah-Pulang” memberikan persepsi negatif. Hal ini dikarenakan mahasiswa tersebut acuh oleh fenomena sosial yang terjadi. Mahasiswa “Kuliah-Pulang” hanya sekedar mengetahui fenomena tersebut namun tidak memahami fenomena sosial yang terjadi secara mendalam.

Inilah yang kemudian mendasari penulis ingin meneliti secara lebih dalam tentang citra kepemimpinan dibenak khalayak mengenai sosok Joko Widodo dalam kasus vaksin palsu. Terkhusus pada benak Mahasiswa Ilmu Komunikasi USNI Jakarta sebagai *authentic public* atau publik berperhatian.

Berpijak dari latar belakang di atas, maka menarik peneliti untuk meneliti dan menulis dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: ***“Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Satya Negara Indonesia Mengenai Citra Kepemimpinan Joko Widodo Pada Kasus Vaksin Palsu”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini hanya melihat sejauh mana persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta mengenai citra Joko Widodo pada kasus vaksin palsu?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta mengenai citra Joko Widodo pada kasus vaksin palsu. Karena Mahasiswa Ilmu Komunikasi USNI merupakan bagian dari publik diperhatikan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan khazanah keilmuan mengenai ilmu komunikasi, khususnya komunikasi politik yang menyangkut citra dan persepsi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Melalui tulisan ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan mengenai pencitraan yang dibentuk oleh Joko Widodo dalam kasus vaksin palsu.